

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah kegiatan yang mana kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya di Indonesia yang masih memiliki tingkat pengangguran dan kemiskinan yang lumayan tinggi. Umumnya di negara berkembang seperti Indonesia, terjerumus dalam keadaan yang disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan. “Lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna dan keterlibatan ekonomi” Suatu pembangunan akan berjalan dengan baik bukan hanya dari pemerintahannya saja akan tetapi dengan adanya peran dari masyarakatnya juga yang aktif dalam peningkatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik lagi untuk negara tersebut.

Pembangunan Nasional memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga penerimaan negara perlu ditingkatkan. Penerimaan dari dalam negeri yang harus terus digali dan ditingkatkan adalah sektor perpajakan karena sektor perpajakan merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial, melihat hal tersebut dibutuhkan penerimaan pajak yang cukup besar untuk pendanaan dalam melaksanakan tanggungjawab negara (Rusydi, 2009). Semakin besar

penerimaan pajak yang diterima maka semakin besar pendapatan yang didapati oleh suatu negara (Alim,2005).

Dengan adanya kemajuan pembangunan di segala bidang, maka pemerintah juga harus mempunyai dana untuk membangun suatu infra struktur tersebut agar berjalan lebih optimal. Salah satu sumber dana pemerintah untuk meningkatkan sektor pembangunan tersebut yaitu penerimaan dari sektor pajak. Pendapatan dari sektor pajak ini di upayakan akan mengalami kenaikan. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak di danai sari sektor pajak. Oleh sebab itu maka dibutuhkan peran penting dari masyarakat untuk berpartisipasi untuk memajukan sektor pajak tersebut dengan cara rajin membayar pajak tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis Pajak Daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah,2015). Menurut Puspita (2014), pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan.

Perkembangan PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010 (Hidayanti, 2011). Dalam Bab I diatur tentang Ketentuan Umum

yang memberikan penjelasan tentang istilah-istilah teknis atau definisi-definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti pengertian:

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
Pengertian tersebut artinya bahwa bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi benar-benar bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan pedalaman atau laut.

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut: Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% per tahun. Untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% per tahun. Untuk NJOP Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% per tahun.

Menurut Laksito(2014) pada dasarnya faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi wajib pajak (yusnidar,2015). Jika kesadaran wajib pajak tinggi yang berasal dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan untuk daerah sektor pajak semakin meningkat (Handayani,2012).

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (Suyono,2016). Dengan mengetahui tentang peraturan perpajakan maka di himbau untuk tertib dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Kristanty,2014).

Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* dimana dalam prosesnya secara mutlak kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Tata cara pemungutan dengan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (Hidayatulloh,2013).

Arti kata *self assessment systema* adalah menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak yang terhutang dan membayar pajak tersebut sebelum memasukan SPT. Sistem ini sebelumnya tidak dikenal di Indonesia dan baru diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1967 dengan diundang-undangkan No.8 tahun 1967, tentang cara pungutan pajak melalui MPS dan MPO (Menghitung Pajak Sendiri dan Menghitung Pajak Orang Lain).

Di Indonesia *self assessment system* baru diterapkan pada Pajak Penghasilan 1984, sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan masih dipertahankan system surat ketetapan yang dinamakan Surat Pemberi Tahunan Pajak Terutang (SPPT PBB) untuk membedakan dengan Surat KetetapanPajak yang selalu diikuti dengan denda.

Masalah yang muncul di dalam Desa Jirapan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen kurangnya sosialisasi tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Di desa tersebut sebagian dari penduduknya berprofesi sebagai petani dan berkebun. Pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh kelurahan kepada masyarakat pada setiap tahunnya, namun terkadang pemungutan tersebut tidak setiap bulan di tarik sehingga ada penumpukan, sehingga para warga ditariki pajak lebih besar. Tidak sedikit masyarakat yang ingin membayarkan pajaknya tanpa menunggu petugas kelurahan, tapi tidak sedikit pula para warga yang sabar menunggu pegawai kelurahan untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut. Mereka yang ingin membayarkan pajaknya sendiri tidak mengetahui harus membayarkan pajaknya kemana dan bagaimana.

Tetapi kebanyakan warga Jirapan menginginkan bayar pajaknya melalui petugas kelurahan saja, dan enggan untuk pergi ke kantor pos atau bank jateng. Sehingga petugas kelurahan harus rajin dalam pemungutan pajak PBB. Sistem yang ada di Kabupaten Sragen tentang pajak bumi dan bangunan biasanya pipil yang pajak yang diberikan oleh daerah akan diserahkan atau akan diberikan kepada perangkat desa, terus warga desa menyetorkan pajak bumi dan bangunan kepada perangkat desa. Setelah itu perangkat desa angkat menyetorkan pajak tersebut ke daerah.

Setiap tahun terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan antara Rp 1.000.000.000,00-Rp3.000.000.000,00. Adanya PBB yang berhenti karena surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tidak sampai kepada wajib pajak (WP). Hal ini membuat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut kurang maksimal dan realisasi PAD dari sektor PBB tidak bisa mencapai 100%. Hal ini di sampaikan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sragen, Dwiyanto (02 maret 2018). Selama ini PBB adalah salah satu sumber PAD yang menjadi andalan bagi daerah. Dia menyebutkan banyak faktor yang menyebabkan pajak tersebut tidak maksimal. Diantaranya SPPT PBB tidak sampai ketangan wajib pajak. Selain itu mungkin saja pajak tersebut berhenti di wilayah, baik ditingkat perangkat desa sampai kecamatan. Dwiyanto menyebutkan, potensi PBB di Kabupaten Sragen lebih dari Rp 19 milyar. Pada tahun 2017 lalu terealisasi Rp 18,2 milyar, sementara tahun ini PBB targetkan mencapai Rp 18,2 milyar.

Bupati Sragen dr.Kusdinar Untung Yuni Sukowati di dampingi Wakil Bupati Dedy Endiyatno,S.E., dan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab.Sragen Dwiyanto,.SSTP,M.Si., memberikan penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018. Dalam pengarahannya Bupati memberikan apresiasi bagi wilayah kecamatan dan desa yang bias lunas sebelum 31 Mei 2018.

Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Sragen telah memudahkan bagaimana masyarakat membayar pajak bumi dan bangunannya sendiri. Untuk membayar pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-B2) kini bisa dilakukan melalui kantor pos. Pelayanan ini mendekatkan masyarakat dengan tempat pembayarannya. Karena hampir semua kecamatan di Sragen terdapat kantor pos. Sehingga masyarakat yang jauh dari Bank Jateng bisa memilih membayar lewat kantor POS.

Mantan Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) ini mengatakan, dengan membayar pajak non-tunai diharapkan dapat mengurangi kebocoran dan pajak terhenti di wilayah, karena langsung masuk ke kas daerah.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah bekerjasama terhadap Bank Jateng dengan Kantor Pos sejak akhir tahun lalu. Sistem yang sudah online tersebut secara otomatis akan terkirim ke server di Bank Jateng maupun server di BPPKAD.

Permasalahan tersebut yang membuat peneliti ingin meneliti masalah tentang kesadaran membayar pajak yang telah di paparkan di atas dengan

mengambil judul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, Studi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Jirapan Kabupaten Sragen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan ?
2. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan ?
3. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan ?
4. Apakah terdapat pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Untuk menganalisis pengaruh pendataan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menerapkan pembelajaran yang selama ini di pelajari selama kuliah, sebagai semua jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan sebagai peningkatan wawasan tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan tindakan sebagai kebijakan tentang pajak dan dapat memberikan masukan keadaan masyarakat yang riil dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.